



► UMK 2024

Buruh Minta Upah Rp4,13 Juta

JOGJA—Buruh di Bumi Mataram yang terhimpun dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengadakan survei Kebutuhan Layak (KHL). Hasilnya direkomendasikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2024 nanti naik signifikan dibanding tahun ini.

Survei KHL yang dilakukan MPBI DIY didasarkan pada harga-harga bahan pokok serta kebutuhan hidup lainnya. "Kebutuhan pokok ini kami survei di pasar-pasar di kabupaten/kota di DIY, survei yang dilakukan juga didasarkan pada Permenaker No.18/2020 di mana tujuan survei ini agar kebijakan pengupahan sesuai dengan kondisi riil buruh," kata Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, Rabu (11/10).

Hasil survei KHL itu, menurut Irsyad, menunjukkan minimal UMK di Kota Jogja sebesar Rp4,13 juta; Sleman 4,09 juta; Bantul Rp3,7 juta; Kulonprogo Rp3,59 juta; dan Gunungkidul minimal Rp3,16 juta. "Jika UMK 2024 di kabupaten/

kota DIY tidak sesuai itu, maka kemungkinan pekerja di DIY hidup tak layak," katanya.

Irsyad menerangkan upah layak sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin warga negaranya mendapatkan penghidupan yang layak. "Sayangnya kebijakan upah murah ini sekarang justru mendominasi di seluruh Indonesia, terutama DIY. Kebijakan itu terutama hadir lewat Undang-Undang Cipta Kerja, di mana survei KHL tidak digunakan lagi sebagai standar menentukan upah," katanya.

Meskipun begitu, MPBI DIY yang membawahi serikat dan organisasi buruh di Bumi Mataram tetap mendorong Pemda DIY untuk memberikan kebijakan pengupahan yang layak. "Dorongan tersebut salah satunya sudah kami sampaikan hasil survei KHL ke Disnakertrans DIY dengan harapan disampaikan ke Gubernur agar dibahas dan diakomodasi dalam penentuan UMK 2024," katanya. Penentuan UMK 2024 di DIY akan dilakukan November 2023. (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005